

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT
MASYARAKAT UNTUK BERALIH KE SERTIPIKAT ELEKTRONIK
DI KELURAHAN JAGALAN KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ZUHUD

NIT. 22314252

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the level of public trust in electronic land certificates (e-certificates), (2) analyze the level of community interest in switching to e-certificates, and (3) analyze the influence of trust level on switching interest in Jagalan Village, Mojokerto City. The research employs a quantitative approach with a survey method. The population consists of all land rights holders in Jagalan Village, totaling 1,115 individuals. A sample of 63 respondents was selected using cluster sampling technique. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using descriptive statistics and simple linear regression with Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The descriptive analysis results indicate that the level of public trust falls into the moderate category (mean = 40.65, from a range of 23-70), with the majority of respondents (69.8%) classified in the moderate category, 12.7% in the low category, and 17.5% in the high category. The level of switching interest also falls into the moderately low category (mean = 9.62, from a range of 4-20), with 65.1% of respondents in the moderate category, while the low and high categories each accounted for 17.5%. The simple linear regression analysis yielded the equation $Y = -2.292 + 0.293X$, with a coefficient of determination (R^2) of 0.577, indicating that trust level explains 57.7% of the variance in switching interest, while the remaining 42.3% is influenced by other factors not examined in this study. The hypothesis test yielded a t-count value (9.120) exceeding the t-table (1.999) with a significance level of $0.000 < 0.05$, thus H_0 is rejected and H_1 is accepted. In conclusion, the level of public trust has a positive and significant effect on community interest in switching to electronic land certificates in Jagalan Village, Mojokerto City.

Keywords: Trust, Switching Interest, Electronic Certificate.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Format Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel.....	28
D. Definisi Operasional Konsep.....	30
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	31
F. Uji Kualitas Instrumen	34
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Mojokerto	44
B. Gambaran Umum Kelurahan Jagalan	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51

A. Kepercayaan Masyarakat Kelurahan Jagalan Terhadap Sertipikat-el	52
B. Minat Beralih Masyarakat Kelurahan Jagalan Terhadap Sertipikat-el.....	59
C. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Minat Beralih.....	63
BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memegang peranan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seperti dikutip oleh Monalu, (2023) tanah penting bagi masyarakat tidak hanya sebagai sarana pemersatu, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Lebih lanjut, tanah berfungsi sebagai basis bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan berbagai kebutuhan lainnya yang bergantung padanya. Pengakuan terhadap hak atas tanah ini ditegaskan secara konstitusional di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 mengenai penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Perkembangan dunia yang memasuki era digitalisasi membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi sistem administrasi pertanahan. Implikasinya, diperlukan pembaruan terhadap sistem pembuktian hak atas tanah melalui sertifikat. Sistem sertifikat konvensional, yang berbasis dokumen kertas (buku), memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Menurut Monalu, (2023) kelemahan tersebut meliputi “kerentanan terhadap kerusakan dan kehilangan, kemudahan untuk dipalsukan, dan mudah digandakan”. Akibatnya, sertifikat konvensional menjadi kurang praktis dan kurang aman jika dibandingkan dengan sertifikat elektronik (sertipikat-el). Kelemahan ini, khususnya dalam konteks administrasi, berpotensi menimbulkan masalah serius seperti duplikasi sertifikat, pemalsuan, dan sengketa tanah. Sebagai solusi, diperlukan alih media dari sertifikat konvensional ke sertifikat-el. Proses ini dilakukan melalui permohonan alih media di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Hidayah et al., 2024).

Kemajuan teknologi informasi serta telekomunikasi yang berlangsung pesat, telah menyebabkan makin bervariasinya jasa fasilitas telekomunikasi, dan produk teknologi informasi yang makin canggih yang dapat menggabungkan seluruh media informasi (Pratama & Sa’adah, 2023). Hampir semua sektor

pendidikan, bisnis, kesehatan, transportasi, hingga pemerintahan sudah banyak beralih ke sistem digital, istilah ini dikenal sebagai transformasi digital.

Transformasi digital memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan di berbagai sektor termasuk pendidikan, industri, sosial, budaya, serta pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Silviana, 2021). Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik pun dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital guna mewujudkan layanan yang terpadu, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Maslan 2023).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha meningkatkan pelayanan pertanahan secara elektronik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Upaya ini mendapat landasan hukum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 (Permen ATR/KBPN) tentang penerbitan dokumen pertanahan secara elektronik, yang mencakup penerbitan buku tanah elektronik (BT-el), sertifikat-el, dan alih media dokumen dari cetak ke digital.

Keberadaan sertifikat-el merupakan bagian dari pembaruan sistem pendaftaran tanah pada masa digital diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan keamanan data kepemilikan tanah. Dengan adanya sistem yang terpadu, sertifikat tersebut dapat membuat proses lebih cepat, menurunkan risiko pemalsuan, dan mempermudah para pemangku kepentingan dalam mengakses data. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan terkait perlindungan keamanan data, kesenjangan akses teknologi, dan resistensi masyarakat terhadap perubahan (Hidayah et al., 2024). Oleh sebab itu, keberhasilan sertifikat-el bergantung pada dua hal yaitu kesiapan aturan dan teknologi, serta upaya non teknis seperti membangun kepercayaan publik, sosialisasi terus menerus dan meratakan akses teknologi. Dengan begitu, perubahan menuju layanan pertanahan digital dapat diterima serta dimanfaatkan secara maksimal.

Meski menjadi terobosan dalam reformasi pendaftaran tanah di era digital, penerapan sertifikat-el masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus

diselesaikan agar implementasinya dapat berjalan optimal. Menurut Hidayah et al., (2024), kendala-kendala tersebut meliputi: kesenjangan infrastruktur teknologi, kerentanan keamanan siber, rendahnya literasi digital, tidak siap regulasi, koordinasi antar-instansi yang lemah, rendahnya kepercayaan masyarakat, dan tingginya biaya awal. Alimuddin, (2021) menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh keengganan sebagian masyarakat untuk beradaptasi dengan pelayanan publik berbasis teknologi. Selain itu, terdapat persepsi Syamsur et al., (2023) bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menerapkan sertifikat-el, sehingga masyarakat cenderung memilih untuk tetap menggunakan sertifikat konvensional. Kondisi seperti ini berpotensi menghambat penerapan sertifikat-el, padahal seharusnya sertifikat-el mampu mengurangi perselisihan pertanahan dan memperkuat keabsahan sertifikat tanah sebagai bukti hak milik di Indonesia.

Berlatar belakang tantangan yang telah ada, faktor kepercayaan publik (*public trust*) muncul sebagai hambatan yang paling mendasar dan bersifat psikologis. Kepercayaan tidak berhenti hanya pada bagaimana masyarakat menilai terhadap teknologi semata, tetapi mencakup sejauh mana masyarakat meyakini kejujuran, kompetensi, dan niat baik pemerintah sebagai penyelenggara layanan (Mayer et al., 1995). Dalam konteks sertifikat-el yang menyangkut aset vital berupa tanah, kepercayaan ini mencakup keyakinan akan keamanan data digital, keakuratan informasi, keandalan sistem, dan teknologi. Tanpa fondasi kepercayaan ini, inovasi teknologi secanggih apa pun akan sulit mendapatkan penerimaan yang tulus dari masyarakat.

Pada tahap adopsi teknologi, minat atau niat untuk beralih (*intention*) merupakan konstruk kunci yang menjadi pendahulu langsung dari perilaku aktual (Venkatesh et al., 2003). Minat ini bukan hanya ketertarikan pasif, tetapi merupakan niat atau kesiapan psikologis seseorang untuk meninggalkan produk atau layanan lama (sertifikat konvensional) dan mengadopsi yang baru (sertifikat-el). Minat tersebut dibentuk oleh evaluasi individu terhadap manfaat, kemudahan, tekanan sosial, dan yang terutama, tingkat kepercayaan yang mereka miliki terhadap inovasi tersebut (Purwanto & Susanto, 2018). Oleh karena itu, dalam upaya mendorong migrasi ke sertifikat-el, memahami dan

menganalisis sejauh mana kepercayaan publik memengaruhi minat untuk beralih menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan.

Merujuk pada penelitian-penelitian yang sudah ada, terdapat hubungan yang kuat antara kepercayaan dan minat adopsi teknologi dalam layanan publik. Purwanto & Susanto, (2018) menyimpulkan bahwa kepercayaan berperan penting dan berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan pemerintah elektronik (*e-government*) suatu temuan yang secara konseptual relevan untuk memahami minat masyarakat dalam mengadopsi layanan elektronik pada sektor pertanahan. Namun pada penelitian itu belum secara mendalam membahas bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam konteks digitalisasi pelayanan pertanahan, khususnya sertipikat-el. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk menutup kesenjangan kajian tersebut dengan cara melakukan analisis yang berfokus pada hubungan tersebut.

Kebijakan transformasi digital pertanahan berlandaskan pada arahan strategis nasional. Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 menetapkan percepatan pencapaian status kabupaten/kota lengkap sebagai program prioritas untuk meningkatkan kepastian hukum melalui penyediaan data dasar pertanahan yang komprehensif. Sebagai provinsi dengan kinerja pendaftaran tanah yang tinggi, Jawa Timur mendorong pemerintah daerah di wilayahnya untuk memenuhi target tersebut. Terdapat salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berhasil mencapai status ini adalah Kota Mojokerto, yang secara resmi dideklarasikan sebagai kota lengkap oleh Menteri ATR/BPN pada 30 Mei 2024 (Times, 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto, (2025), Kelurahan Jagalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan. Jagalan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Kecamatan Kranggan, 11.792 jiwa per km², yang menjadikannya wilayah urban yang padat dan representatif untuk studi dinamika sosial. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebagian warga Kelurahan Jagalan masih belum tertarik untuk beralih ke sertipikat-el. Menurut beberapa keterangan warga menunjukkan bahwa terdapat warga yang masih merasa khawatir data tanahnya tidak aman dalam bentuk digital sehingga mereka lebih memercayai sertipikat konvensional.

Kekhawatiran tersebut sejalan dengan fakta di lokasi penelitian bahwa dari total 1.115 pemegang hak atas tanah di Kelurahan Jagalan, sebanyak 1.050 bidang (94,17%) masih menggunakan sertipikat analog, sementara sertipikat elektronik baru mencapai 65 bidang (5,83%). Dominasi sertipikat konvensional yang sangat tinggi ini mengonfirmasi bahwa adopsi sertipikat elektronik di wilayah tersebut masih berada pada tahap awal (Andhika & Isa, 2025). Dengan demikian, Kelurahan Jagalan menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat memengaruhi minat beralih ke sertipikat elektronik, mengingat secara demografis wilayah ini padat, secara persepsi masyarakat masih ragu, dan secara empiris penggunaan sertipikat elektronik masih sangat rendah.

Oleh karena itu, meski pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur digital, masalah utamanya justru terletak pada apakah masyarakat percaya dan mau menerima teknologi baru ini (Wandi, 2026). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah seberapa besar pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap minat mereka untuk beralih ke sertipikat-el. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan pada kajian-kajian sebelumnya yang belum spesifik membahas faktor kepercayaan dalam konteks layanan pertanahan digital sertipikat-el. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat untuk Beralih ke Sertipikat Elektronik di Kelurahan Jagalan Kota Mojokerto.”**

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi luasnya variabel penelitian maka perlu dibuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat-el?
2. Bagaimana minat beralih masyarakat terhadap sertipikat-el?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat kepercayaan terhadap minat masyarakat untuk beralih ke sertipikat-el?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat-el.
- b. Untuk menganalisis tingkat minat beralih masyarakat terhadap sertipikat-el.
- c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan terhadap minat masyarakat untuk beralih ke sertipikat-el.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Bagi akademik: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta menjadi referensi akademik, khususnya di Politeknik Agraria STPN, dalam kajian pelayanan pertanahan berbasis digital dan pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap minat penggunaan sertipikat-el.
- 2) Bagi peneliti: melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pelayanan pertanahan digital serta faktor kepercayaan masyarakat dalam mendukung transformasi layanan publik di bidang pertanahan.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Bagi pemerintah: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran evaluatif mengenai kepercayaan publik dalam optimalisasi program sertipikat-el.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis atau sebagai dasar pengembangan variabel dalam kajian pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat kepercayaan terhadap minat masyarakat untuk beralih ke sertipikat elektronik di Kelurahan Jagalan Kota Mojokerto, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik di Kelurahan Jagalan tergolong dalam kategori sedang. Hal ini tercermin dari dominasi responden pada kategori sedang sebesar 69,8% (44 responden), sementara 12,7% (8 responden) berada pada kategori rendah dan 17,5% (11 responden) berada pada kategori tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 40,65 yang berimpit dengan titik tengah teoritis rentang sedang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem digitalisasi pertanahan ini belum berkembang secara optimal ke arah yang lebih positif. Besarnya nilai standar deviasi (11,64) mengungkapkan adanya keragaman persepsi yang cukup lebar di antara responden, di mana sebagian masyarakat telah menunjukkan kepercayaan yang tinggi, namun sebagian lainnya masih memandang sistem ini dengan skeptis. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa upaya penguatan kepercayaan digital dan peningkatan literasi masyarakat terhadap sistem pertanahan elektronik masih perlu ditingkatkan secara lebih intensif oleh Kementerian ATR/BPN.
2. Minat masyarakat untuk beralih ke sertipikat elektronik di Kelurahan Jagalan juga tergolong dalam kategori rendah hingga sedang. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel minat beralih menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Kelurahan Jagalan untuk meninggalkan sertipikat konvensional dan beralih ke sertipikat elektronik berada pada kategori sedang cenderung rendah. Sebanyak 65,1% responden (41 orang) tergolong dalam kategori sedang, sedangkan kategori rendah dan tinggi masing-masing diwakili oleh 11 responden (17,5%). Nilai rata-rata sebesar 9,62 yang berada di batas bawah rentang kategori

sedang menegaskan bahwa dorongan masyarakat untuk bertransisi ke sistem digital belum terbentuk secara kuat. Keceragaman distribusi antara kategori rendah dan tinggi, serta nilai standar deviasi yang relatif kecil (4,49), mengindikasikan bahwa penolakan atau keengganan untuk beralih bersifat merata dan konsisten di kalangan responden. Kondisi ini erat kaitannya dengan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dokumen digital, khususnya ancaman kebocoran data dan serangan siber, yang menjadi hambatan psikologis utama dalam proses adopsi sertipikat elektronik di tingkat masyarakat.

3. Tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk beralih ke sertipikat elektronik di Kelurahan Jagalan Kota Mojokerto. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,120 lebih besar daripada t tabel sebesar 1.670 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu, hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,577 menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan memberikan pengaruh sebesar 57,7% terhadap minat masyarakat untuk beralih ke sertipikat elektronik, sedangkan sisanya sebesar 42,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik, maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk beralih dari sertipikat konvensional ke sertipikat elektronik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Praktis
 - a. Pemerintah perlu memperkuat sistem teknologi data dan sistem transaksi dalam penerapan sertipikat elektronik guna memberikan jaminan perlindungan data serta kepercayaan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya sistem teknologi dan sistem transaksi, masyarakat akan lebih yakin dan percaya terhadap penggunaan sertipikat elektronik.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi digital dalam pelayanan pertanahan serta meningkatkan pemahaman mengenai manfaat sertipikat elektronik sebagai bentuk modernisasi administrasi pertanahan yang lebih efektif dan efisien.

2. Saran Akademis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi minat masyarakat untuk beralih ke sertipikat elektronik, sehingga hasil penelitian dapat menjadi lebih komprehensif.
- b. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar serta cakupan wilayah penelitian yang lebih luas agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih kuat dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh.
- c. Selain menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap penerapan sertipikat elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI*, 27(3). <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Al Maskari, A. (2015). Theory of planned behavior (TPB) Ajzen (1988). In Information seeking behavior and technology adoption: Theories and trends (pp. 237-260). IGI Global Scientific Publishing.
- Alyfarrosi, T. H. A. (2023). *Strategi Kolaborasi Antara Kantor Pertanahan Dan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Jember)*.
- Andhika, T., & Isa, R. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Sertipikat Elektronik: Transformasi Digital, Kepastian Hukum, dan Tantangan Implementasi dalam Sistem Administrasi Pertanahan di Gorontalo*. 3(4), 324–327. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17499101>
- Atha. (2023). *Kajian Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Junrejo, Kota Batu*.
- Azwar, S. (2011). *Penyusunan Skala Psikologi Daerah Istimewah Yogyakarta*. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. (2025). *Kota Mojokerto Dalam Angka 2025* (Agung Prasetyo, Ed.; Vols. 48, 2025).
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, 35(8), 982–1003.
- Dea, P. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*.
- Farوقي, A., Noviardi, Y., Hadiwiyanti, R., & Lathif, T. (2020). *Pengaruh Trust dan Perceived Risk Terhadap Niat Menggunakan E-Government*.

- Gustiaji, K., Gusti Ayu, Handayani, R., & Subekti, R. (2025). Institutional Challenges in the Implementation of Electronic Certificates in Land Services. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 13(2), 85.
- Hall, M. A., Elizabeth Dugan, Beiyao Zheng, & Aneil K. Mishra. (2003). *Trust in Physicians and Medical Institutions: What Is It, Can It Be Measured, and Does It Matter?*
- Hidayah, S., Fikri, M. A. H., Niravita, A., Mukarromah, L., & Hariyani, E. (2024). *Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital*.
- Iriani, D. M. (2018). *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*.
- Japarianto, E., & Adelia, S. (2020). *Pengaruh Tampilan Web dan Harga Terhadap Minat Beli Dengan Kepercayaan Sebagai Intervening Pada e-Commerce*. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.14.1.35-43>
- Jogiyanto, H. (2007). Sistem informasi keperilakuan. andi offset. *Yogyakarta: Andi Offset*, 235, 604.
- Larasanty, L. P. F., Jaya, M. K. A., Astuti, K. W., & Santika, I. W. M. (2021). Pengembangan Kuisisioner Udayana untuk Penilaian Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di Pusat Kesehatan Masyarakat. *JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice)*, 11(1), 62. <https://doi.org/10.22146/jmpf.60998>
- Lisnadia, N. A., Nazir, S. M., Sunandar, M. A., & Suhendro. (2026). Widya Bhumi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Sertipikat Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. In *Widya Bhumi* (Vol. 6, Number 1).
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Barekeng*, 14(3), 333-342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>

- Maslan, M. (2023). Prospek Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Guna Terwujudnya E-Goverment Di Era 4.0. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1). <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4628>
- Mayer, R. C., James H. Davis, & F David Schoorman. (1995). An Interagative Model Of Organizational Trust. *Academy of Management*.
- Mcknight, D. H. (2005). Trust in Information Technology. In *Management Information Systems* (Vol. 7).
- Monalu, T. J., Sumakul, T. F., & Sondakh, M. T. (2023). *Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah Ke Sistem Elektronik Sebagai Jaminan Keamanan*.
- Muflihah, Y., & Susanto, T. D. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Warga dan Pemerintah dalam Adopsi E-Government: Sebuah Ulasan Sistematis. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(4), 304–310. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201744366>
- Muin, M. P. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Nasution, I. N., & Syaf, A. (2018). Hubungan Iklim Kelas Terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK Abdurrah. *Jurnal Psikolog*.
- Papadopolou, P., Nikoladou, M., & Martakos, D. (2010). What Is Trust in E-Government A Proposed Typology. *IEEE Xplore*.
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 254–274. <https://doi.org/10.1177/0020852311399230>
- Pratama, E. Y., & Sa'adah, N. (2023). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik. *Notarius*, 16(3). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41661>

- Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). *Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19*.
- Purwanto, A., & Susanto, T. D. (2018). Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government. *Jurnal INFORM*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/ojsinf.v3i1.520>
- Rafikasari, E. F., & Si, M. (n.d.). *Analisis Deskriptif dan Inferensial*. Retrieved www.akademiapustaka.com
- Ramadhan, M. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Beralihnya Minat Masyarakat Desa Tambe, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Dari Tari Wura Bongi Monca Ke Hiburan Keyboard Tunggal Dalam Acara Nika*.
- Rumengan, F., Femi M.G Tulusan, & Feron Rumengan Very y. Londa. (2019). *Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Samsu, S. Ag. , M. Pd. I. , Ph. D. (2021). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta*.
- Santosa, I., & Purwaningsih, E. (2022). *Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertipikat Tanah Di Era 4.0 (Vol. 9)*. <https://doi.org/doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22496>
- Saputra, M. A. Y. (2022). *Analisis Mimat Mahasiswa Beralih Dari cash Payment ke E-Payment*. 1–55.
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharyat, Y. (2009). *Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia*.

- Suryono, I. L. (2021). Hubungan Kualitas Website, Kepercayaan Dan Niat Untuk Menggunakan Pada Penggunaan E-Government: Studi Kasus Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). In *Jurnal Ketenagakerjaan* (Vol. 16, Number 1).
- Syamsur, Madiung, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Perlakuan Sertipikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makasar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Times, I. (2024, June 3). *Kementerian ATR/BPN Deklarasikan Kota Mojokerto Lengkap, Semua Tanah Terukur dan Terpetakan*. Publik. <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/497758/kementerian-atrbpn-deklarasikan-kota-mojokerto-lengkap-semua-tanah-terukur-dan-terpetakan>
- Togatorop, I. I. P. (2024). *Minat Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri*.
- Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. (2003). User Acceptance Of Information Technology Toward A Unified View. *MIS Quarterly*, 27.
- Verdania, L., & Arwati, D. (2019). *Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transparansi Keuangan Dalam E Government Kota Bandung*. <http://doi.org/10.21070JBMP>.
- Wandi. (2026, April 15). *Transformasi Digital Sertifikat Tanah Diuji: Pemerintah Kejar Kepercayaan Publik di Tengah Tantangan Literasi*. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/966062/transformasi-digital-sertifikat-tanah-diuji-pemerintah-kejar-kepercayaan-publik-di-tengah-tantangan-literasi>
- Wulansari, A. D. (2016). *Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian* (M. Pd. Retno Widyaningrum, Ed.).
- Yuliara, I. M. (2016). Regresi linier berganda. *Denpasar: Universitas Udayana*.

Zeebaree, M., Agoyi, M., & Aqel, M. (2022). Sustainable Adoption of E-Government from the UTAUT Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095370>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.*

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. *tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28.*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.*

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71.*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023. *tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 304.*